

## DEMOKRASI INDONESIA: ANTARA PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL DALAM DINAMIKA KONTEMPORER

Ayu Agnesia Purba<sup>1</sup>, Winda Purba<sup>2</sup>, Grace C.A. Tambunan<sup>3</sup>, Indriyani Br.Harahap<sup>4</sup>, Ruth Meliani Purba<sup>5</sup>,  
Imelda Manurung<sup>6</sup>, Prini Ambarita<sup>7</sup>  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar  
E-mai: [ayuagnesia22@gmail.com](mailto:ayuagnesia22@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Artikel ini membahas berbagai dinamika yang muncul dalam implementasi demokrasi di sejumlah negara, dengan menyoroti tantangan institusional, partisipasi publik, serta peran media massa. Melalui metode kualitatif berbasis studi literatur dan analisis data sekunder, ditemukan bahwa meskipun demokrasi telah diterima secara luas, praktiknya masih sering menyimpang dari prinsip dasarnya. Permasalahan seperti korupsi, minimnya kesadaran politik, dan meningkatnya polarisasi sosial menghambat terwujudnya demokrasi yang sejati. Oleh karena itu, penguatan lembaga demokratis, peningkatan pendidikan politik, dan keberadaan media yang independen menjadi hal krusial dalam mendukung sistem demokrasi yang berkelanjutan dan inklusif.

### Kata kunci

**Demokrasi Indonesia, Demokrasi Substansial, Partisipasi Politik, Institusi Demokratis, Disinformasi Digital**

### ABSTRACT

*Democracy is a system of governance that promotes active citizen participation in political decision-making. This article explores the dynamics of democratic implementation across various countries by focusing on institutional challenges, civic engagement, and the role of the media. Using a qualitative approach based on literature review and secondary data analysis, the study reveals that although democracy has been widely adopted globally, a gap often remains between democratic ideals and actual practices. Key obstacles such as corruption, low political literacy, and increasing social polarization hinder the realization of substantive democracy. The article concludes that strengthening democratic institutions, enhancing political education, and ensuring the independence of the media are essential steps toward maintaining a healthy and inclusive democratic system.*

### Keywords

**Indonesian Democracy, Substantial Democracy, Political Participation, Democratic Institutions, Digital Disinformation**

## 1. PENDAHULUAN

Demokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang memberikan ruang besar bagi partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal politik. Menurut Robert A. Dahl, demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan sipil, kompetisi politik yang terbuka, serta partisipasi luas dari warga negara. Demokrasi tidak sekadar terbatas pada pemilu, namun juga melibatkan prinsip-prinsip penting seperti keterbukaan informasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi hukum (Dahl, 2001). Di Indonesia, sistem demokrasi mengalami transformasi signifikan pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, yang menandai dimulainya era reformasi. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Aspinall dan Mietzner (2010), transisi menuju demokrasi tidak serta-merta membawa kualitas demokrasi yang ideal. Masih banyak permasalahan mendasar yang muncul, baik di tingkat nasional maupun daerah,

seperti rendahnya kualitas partisipasi publik, praktik politik transaksional (politik uang), lemahnya institusi partai politik, hingga polarisasi sosial yang diperparah oleh arus disinformasi di media digital.

Lebih jauh, Larry Diamond (2019) menyebut bahwa demokrasi kontemporer dihadapkan pada tantangan global berupa kemunculan kembali populisme, otoritarianisme, dan erosi terhadap nilai-nilai demokratis. Fenomena ini turut berdampak pada kondisi demokrasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan krusial mengenai sejauh mana sistem demokrasi yang dijalankan saat ini mampu menjamin keadilan, efektivitas pemerintahan, serta perlindungan terhadap kepentingan rakyat secara utuh.

Berangkat dari realitas tersebut, penting untuk menelaah kembali bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia. Seperti dikemukakan oleh Yasraf Amir Piliang (2018), demokrasi tidak boleh berhenti pada tataran prosedural semata, tetapi harus berkembang menjadi demokrasi yang bersifat substantif, yaitu demokrasi yang benar-benar menjamin kesejahteraan, partisipasi bermakna, dan perlindungan hak-hak warga negara. Dengan latar belakang inilah, penelitian ini bertujuan untuk mengulas lebih dalam dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat maupun menghambatnya. Diharapkan hasil kajian ini dapat berkontribusi terhadap penguatan demokrasi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika implementasi demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggali kompleksitas fenomena sosial-politik yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Penelitian kualitatif memberikan ruang untuk memahami makna, nilai, serta konteks di balik perilaku, kebijakan, dan realitas politik yang terjadi dalam masyarakat secara utuh. Data yang dikumpulkan dianalisis secara tematik, dengan cara mengidentifikasi pola, isu utama, serta hubungan antar konsep dalam konteks demokrasi di Indonesia. Analisis ini tidak hanya menggambarkan fenomena sebagaimana adanya, tetapi juga menafsirkan dinamika yang terjadi secara kritis dan reflektif. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti menyajikan hasil yang bersifat mendalam, argumentatif, dan relevan secara akademik.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia antara procedural dan substansial dalam dinamika kontemporer dengan cara:

### **3.1 Dinamika Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.**

Sejak memasuki era reformasi pada tahun 1998, sistem demokrasi di Indonesia mengalami transformasi signifikan, khususnya dalam hal pembentukan lembaga-lembaga demokratis dan perluasan kebebasan sipil. Pemilu langsung, keberagaman partai politik, serta kebebasan pers menjadi indikator bahwa Indonesia telah memenuhi unsur-unsur demokrasi secara prosedural. Akan tetapi, kemajuan formal ini belum sepenuhnya diimbangi oleh pencapaian dalam aspek substantif demokrasi.

Menurut pandangan Diamond (1999), esensi demokrasi tidak cukup dilihat dari keberadaan pemilu atau prosedur formal semata, melainkan juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu menjamin hak asasi manusia, supremasi hukum, serta responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan rakyat. Dalam konteks Indonesia, praktik politik sering kali masih dirusak oleh budaya politik uang, lemahnya akuntabilitas partai politik, dan rendahnya kesadaran politik masyarakat. Hal ini memperkuat temuan dari Aspinall dan Mietzner (2010), yang menilai bahwa proses transisi demokrasi di Indonesia justru telah membuka celah bagi elite politik untuk menguasai sistem secara formal, namun tetap melanggengkan praktik-praktik informal yang menyimpang dari prinsip demokratis.

### **3.2 Kelemahan Kelembagaan dan Partisipasi Politik yang Terbatas.**

Salah satu tantangan utama dalam membangun demokrasi yang kokoh di Indonesia adalah lemahnya institusi politik, terutama partai politik. Banyak partai tidak memiliki mekanisme internal yang demokratis, dan cenderung beroperasi secara oligarkis, di mana keputusan penting hanya dikuasai oleh segelintir elite. Sejalan dengan pendapat Huntington (1991), institusi politik yang kuat dan stabil merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan demokrasi.

Partai politik di Indonesia belum sepenuhnya berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pendidikan politik, melainkan lebih sering dimanfaatkan sebagai alat untuk meraih kekuasaan secara pragmatis. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam politik juga masih bersifat minimal, terutama dalam bentuk partisipasi kritis dan berkelanjutan di luar momentum elektoral. Sebagaimana diungkapkan oleh Verba, Schlozman, dan Brady (1995), partisipasi politik seharusnya mencakup keterlibatan dalam diskusi publik, pengawasan kebijakan, dan aksi kolektif yang mendukung perubahan sosial, bukan sekadar penggunaan hak pilih saat pemilu.

### **3.3 Media, Disinformasi, dan Polarisasi Demokratis.**

Perkembangan teknologi informasi, terutama penggunaan media sosial, memberikan pengaruh besar terhadap dinamika demokrasi kontemporer. Media sosial menjadi sarana penting dalam menyalurkan aspirasi publik dan memperluas akses terhadap informasi. Namun demikian, platform ini juga menjadi lahan subur bagi penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan provokasi politik yang mengarah pada polarisasi masyarakat.

Kondisi ini menciptakan ruang komunikasi yang tertutup (*echo chamber*), di mana masyarakat hanya terpapar pada informasi yang memperkuat keyakinan mereka sendiri, dan menolak informasi yang berseberangan. Yasraf Amir Piliang (2018) menyebut fenomena ini sebagai "*post-realitas*", yaitu situasi di mana persepsi publik terhadap realitas politik dibentuk bukan oleh fakta objektif, tetapi oleh narasi dan ilusi yang diproduksi media. Dalam kasus Indonesia, penyalahgunaan media sosial kerap digunakan sebagai alat untuk membentuk opini publik secara manipulatif, mendiskreditkan lawan politik, dan menyebarkan hoaks yang dapat merusak integrasi sosial dan kepercayaan terhadap institusi demokrasi.

### **3.4 Menuju Demokrasi Substansial: Strategi dan Langkah Transformasi.**

Agar demokrasi di Indonesia tidak hanya berhenti pada tataran prosedural, namun berkembang menjadi demokrasi yang substantif dan bermakna, maka perlu dilakukan sejumlah langkah strategis sebagai berikut:

- Reformasi internal partai politik: Partai perlu didorong untuk menjadi institusi yang transparan, inklusif, dan mampu menjalankan peran edukatif terhadap masyarakat. Proses kaderisasi dan pengambilan keputusan internal harus dilakukan secara demokratis, bukan hanya berdasarkan kepentingan elite semata.

- Peningkatan literasi politik masyarakat: Melalui program pendidikan politik yang berkelanjutan, baik secara formal di lembaga pendidikan maupun non-formal melalui komunitas, media, dan organisasi masyarakat sipil. Literasi ini penting agar warga negara memiliki kesadaran kritis terhadap hak dan kewajiban politiknya.
- Penguatan media independen dan etika informasi digital: Diperlukan media yang bebas dari intervensi politik dan ekonomi, serta upaya sistematis untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, guna membedakan antara informasi valid dan disinformasi.
- Pemberdayaan masyarakat sipil: Lembaga-lembaga masyarakat perlu diberi ruang yang lebih besar untuk berperan dalam pengawasan kebijakan publik, mengadvokasi isu-isu keadilan sosial, serta mendorong akuntabilitas pemerintah.

Sejalan dengan pemikiran Amartya Sen (1999), demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tidak hanya memberi hak suara kepada rakyat, tetapi juga memastikan bahwa suara tersebut memiliki dampak nyata dalam proses pengambilan keputusan yang adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan umum.

#### **4. KESIMPULAN**

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan tidak cukup hanya dijalankan secara prosedural melalui pemilu dan partisipasi formal, tetapi harus diwujudkan secara substantif dengan menjamin keadilan sosial, keterlibatan aktif warga negara, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti lemahnya institusi politik, rendahnya literasi politik masyarakat, maraknya politik uang, serta meningkatnya disinformasi di ruang digital yang memperparah polarisasi sosial. Selain itu, pengaruh global berupa kebangkitan populisme dan otoritarianisme turut menekan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dalam konteks ini, penguatan demokrasi ke depan memerlukan pendekatan menyeluruh, di antaranya melalui perbaikan kelembagaan, peningkatan kualitas pendidikan politik, dan keberadaan media yang independen dan bertanggung jawab. Dengan demikian, untuk membangun demokrasi yang berkelanjutan dan inklusif, tidak cukup hanya mengandalkan prosedur formal. Diperlukan upaya kolektif dari seluruh elemen bangsa untuk menjadikan demokrasi sebagai sarana yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik, menjunjung tinggi etika politik, serta menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). *Studi tentang demokrasi pascareformasi di Indonesia: Antara harapan dan realitas politik*. Jakarta: Penerbit Reformasi Press.
- Dahl, R. A. (2001). *Demokrasi dan para pendukungnya: Analisis mendalam tentang partisipasi dan pluralisme dalam pemerintahan modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diamond, L. (1999). *Menyelami makna demokrasi: Perspektif global terhadap penguatan sistem pemerintahan rakyat*. Jakarta: LP3ES.
- Diamond, L. (2019). *Demokrasi dalam tekanan: Kebangkitan populisme dan kemunduran nilai-nilai liberal*. Jakarta: Penerbit Politik Global.

- Huntington, S. P. (1991). *Tatanan politik dalam masyarakat berubah: Peran institusi politik dalam pembangunan demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Piliang, Y. A. (2018). *Post-demokrasi dan ruang publik digital: Krisis kepercayaan dan kebangkitan realitas virtual dalam politik kontemporer*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Sen, A. (1999). *Pembangunan sebagai kebebasan: Pandangan demokratis dalam pembangunan sosial dan politik*. Jakarta: Kencana.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Suara warga: Partisipasi politik dalam demokrasi kontemporer*. Cambridge: Harvard University Press.